

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG MELALUI INTEGRASI DENGAN GEOKKP

“PILOT PROJECT PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG GEOPARK/GEOSITE BELITONG”



Nama : ARLI BUCHARI
NIP : 19791111 200212 1 005
No Absen : 08
Jabatan : Kasubdit Tematik Pertanahan Dan Ruang
Unit Kerja : Direktorat Survei Dan Pemetaan Tematik

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Disahkan di Cikeas, bulan Jnni tahun 2020

Coach,

Mentor,

Ir. RATMONO, M.Si.
NIP. 19600121 198603 1 001

Ir. YULI MARDIYONO, M. Eng. Sc.
NIP. 196706011995031001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta: Arli Buchari

NIP : 19791111 200212 1 005

Jabatan : Kasubdit Tematik Pertanahan dan Ruang

Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Angkatan : I

Unit Kerja : Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Judul Rancangan Aksi Perubahan:

OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG MELALUI INTEGRASI DENGAN GEOKKP “PILOT PROJECT PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG GEOPARK/GEOSITE BELITONG”

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

Coach

Mentor

Ir. RATMONO, M.Si.
NIP. 19600121 198603 1 001

Ir. YULI MARDIYONO, M. Eng. Sc.
NIP. 196706011995031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan lancar. Laporan Aksi Perubahan ini disusun sebagai bentuk implementasi pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Laporan Aksi Perubahan ini mengambil judul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG MELALUI INTEGRASI DENGAN GEOKKP (*PILOT PROJECT* PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG GEOPARK/GEOSITE BELITONG)”.

Banyak hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang telah diperoleh di dalam kelas selama pelatihan. Dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Ir. Yuli Mardiyono, M. Eng. Sc sebagai Mentor dan Bapak Ir. Ratmono, M.Si sebagai *Coach* menjadi panduan untuk menjalankan aksi perubahan ini guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan kinerja organisasi.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan karena keterbatasan kami, untuk itu sumbang saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Arli Buchari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Manfaat Aksi Perubahan	5
BAB II.....	7
A. Tugas Dan Fungsi Organisasi	7
1. Tugas dan Fungsi Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	7
2. Tugas Fungsi Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang	9
3. Area Bermasalah	9
B. Sumber Daya Organisasi	9
BAB III	12
A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah.....	12
B. Penetapan Masalah Utama.....	13
C. Analisis Kelayakan Inovasi.....	15
BAB IV.....	17
A. Terobosan Inovasi	17
B. Tahapan Kegiatan	18
C. Pemanfaatan Sumber Daya	20
D. Manajemen Risiko	23
BAB V.....	25
A. Proses Kepemimpinan	25
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	25

2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	35
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	35
B. Hasil Kepemimpinan	36
1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	36
2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan.....	37
3. Manfaat Aksi Perubahan	38
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	38
1. Legalitas Penerapan Inovasi	38
2. Keberlanjutan Kegiatan Inovasi Dengan Menetapkan Target Jangka Menengah Dan Jangka Panjang.....	39
BAB VI.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	3
Tabel 2. Jumlah SDM Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	10
Tabel 3. Matriks Identifikasi Masalah dengan Metode USG	12
Tabel 4. Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Pendek.....	19
Tabel 5. Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	20
Tabel 6. Potensi Hambatan dan Mitigasi Risiko	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Renstra Kementerian ATR/BPN 2020 - 2024	1
Gambar 2. Aplikasi SiPetik Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	11
Gambar 3. Geoportal Tematik Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik.....	11
Gambar 4. Diagram Fishbone Penetapan Masalah Utama	14
Gambar 5. Kanvas Model Analisis Kelayakan Inovasi	15
Gambar 6. Proses PTPR yang terintegrasi dengan GeoKKP	17
Gambar 7. Netmap Stakeholders.....	21
Gambar 8. Bagan Analisa Stakeholders	22
Gambar 9. Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholders	26
Gambar 10. Rapat Dengan Tim Aksi Perubahan	27
Gambar 11. Rapat Teknis dan Sosialisasi dengan Stakeholders	28
Gambar 12. Contoh Persiapan Peta Kerja	28
Gambar 13. Sosialisasi dan Koordinasi Dengan Stakeholder	29
Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan	29
Gambar 15. Pelaksanaan Survey Lapangan Dan Pengolahan Data.....	29
Gambar 16. Pelaksanaan kegiatan integrasi PTPR ke dalam GeoKKP	30
Gambar 17. Berita Kegiatan Pemetaan Tematik Geopark	31
Gambar 18. Workshop Hasil Peta Tematik Pertanahan	31
Gambar 19. Contoh hasil integrasi PTPR ke dalam GeoKKP.....	32
Gambar 20. Rapat Teknis Penyusunan Buku Panduan	32
Gambar 21. Buku Panduan.....	33
Gambar 22. Review Eksternal dengan Direktorat Jenderal Anggaran	34

Gambar 23. Terangarkannya Integrasi PTPR ke GeoKKP	34
Gambar 24. Koordinasi dengan Para Stakeholders	36
Gambar 25. <i>Cascade</i> Renstra Kementerian ATR/BPN.....	38

DAFTAR BAGAN

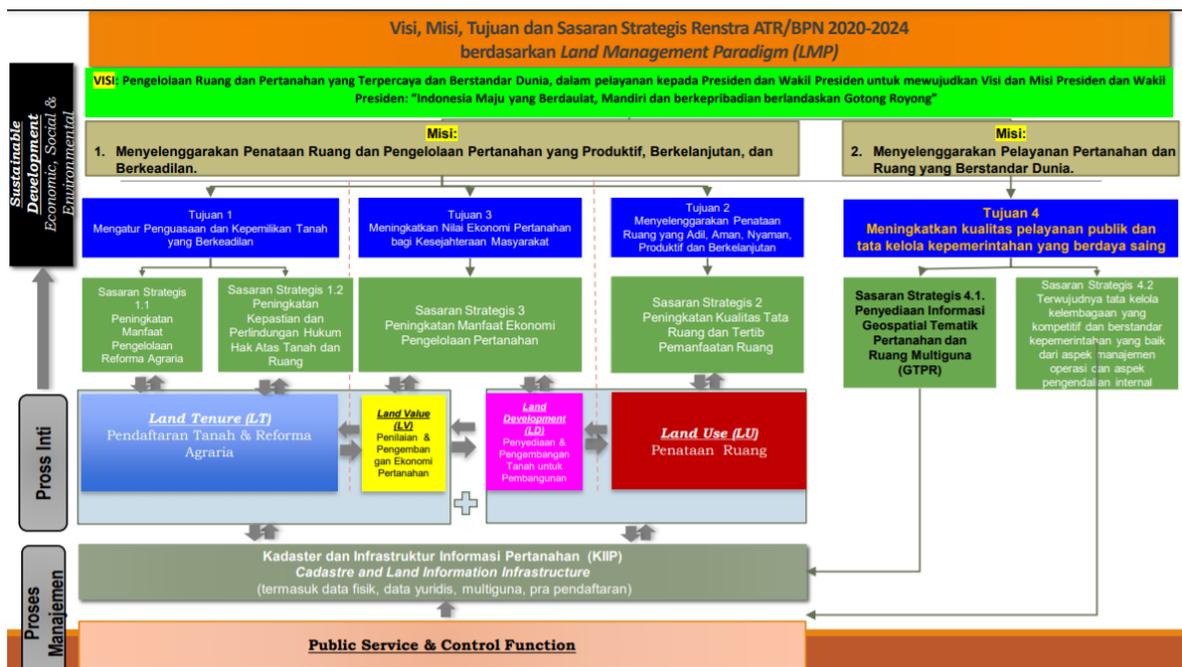
Bagan 1. Bagan Struktur Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik	8
Bagan 2. Tim Kerja Aksi Perubahan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Renstra 2020-2024 telah menetapkan visi Kementerian yakni Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.



Gambar 1. Renstra Kementerian ATR/BPN 2020 - 2024

Rancangan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2020-2024 berdasarkan *Land Management Paradigm* menjelaskan bahwa Kadaster dan Infrastruktur Pertanahan (KIP) dibutuhkan sebagai pondasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian ATR/BPN. KIP menjadi *basic layer* bagi berbagai macam fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan, yaitu dalam aspek *land tenure, land*

value, land use, dan land development. KIP terwujud melalui kegiatan survei dan pemetaan yang lengkap (*completeness*) dan valid (*reliable*).

Aspek strategis organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR). Sebagai salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dirjen SPPR mempunyai peran sangat strategis, yaitu mengemban amanat sebagai penyedia infrastruktur dasar bagi pengelolaan pertanahan dengan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral serta survei dan pemetaan tematik. Hasil akhir pelaksanaan tugas dan fungsi adalah tersedianya data, peta dan informasi pertanahan yang mendukung penyelenggaraan manajemen pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja Dirjen SPPR dibantu oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik ditetapkan sebagai Unit Produksi dan Unit Pengelola data dan informasi geospasial tematik. Unit produksi diartikan sebagai unit yang ditugaskan dan berwenang untuk memproduksi (mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan memutakhirkan) dan mengatur serta berkoordinasi mengenai data, metadata, dan informasi tematik.

Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang merupakan salah satu subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik yang mempunyai tugas untuk mendukung kegiatan pemetaan tematik, salah satunya melaksanakan kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Kegiatan PTPR mulai terbentuk dimulai dengan adanya Renstra 2020-2024, untuk lebih jelasnya terkait PTPR dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan *Cascade* Renstra Dirjen SPPR, PTPR merupakan salah satu IKK dalam mendukung IKP Dirjen SPPR yaitu dengan sasaran program tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang.
2. Dengan adanya Renstra 2020-2024, pelaksanaan kegiatan IP4T beralih dari Dirjen Penataan Agraria ke Dirjen SPPR dan masuk dalam DIPA Dirjen SPPR untuk kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang.
3. Data tematik pertanahan dan ruang pada hakikatnya merupakan informasi tematik dasar yang menjadi *basic layer* (tatakan) bagi kegiatan pertanahan dan tata ruang. Dengan tersedianya data yang terstandarkan, akan memudahkan penggunaan data lebih lanjut untuk berbagai kegiatan :
 - a. Sebagai bahan untuk Deliniasi BWP, PZ dan perencanaan tata ruang lainnya, penataan P4T; kajian kebijakan P4T;
 - b. Untuk menunjang kegiatan strategis seperti perencanaan kawasan IKN, perencanaan kawasan untuk cadangan pangan (*food estate*), penataan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas;
 - c. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) sebagai kegiatan kolaboratif lintas K/L;
4. Gambaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 – 2021 dapat dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang

Tahun	PTPR	Target	Satuan
2020	a. Pusat <ul style="list-style-type: none"> • IKN • <i>Food Estate</i> • Kawasan Borobudur 	246.300	Hektar
2021	b. Pusat <ul style="list-style-type: none"> • IKN • <i>Food Estate</i> • PTPR Batas Kawasan Hutan (WB) • PTPR Redistribusi Tanah (WB) • Geopark/Geosite Belitong 	641.198	Hektar
	c. Daerah <ul style="list-style-type: none"> • 312 Satker (Kanwil dan Kantah) 	953.000	Bidang

Untuk proses pengambilan dan pengolahan data dikembangkan Aplikasi Mobile Sipetik dan Geoportal Tematik yang dimulai tahun 2019 melalui *open source platform*. Dengan adanya geoportal dan Aplikasi Mobile SiPetik tersebut pelaksanaan pengumpulan dan penyajian Informasi Geospasial Tematik PTPR menjadi semakin mudah, modern dan cepat, tetapi data yang dihasilkan belum terintegrasi dengan GeoKKP dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

Demi mendukung kualitas dan akurasi data serta informasi yang dihasilkan dalam analisis data spasial, maka merasa perlu data PTPR terhubung dengan GeoKKP. Data-data yang telah sesuai akan disimpan dan dikelola di dalam basis data terpusat dan dipublikasikan sesuai hak akses, baik untuk kebutuhan internal maupun publik melalui GeoKKP. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka dipilih Geopark Belitong sebagai lokasi *Pilot Project* Aksi Perubahan ini.

Geopark Belitong telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark di Indonesia dalam sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO pada Bulan April 2021. Kawasan Geopark Belitong seluas 81.309,49 Ha merupakan salah satu area kerja Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik pada Tahun Anggaran 2021 yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kegiatan PTPR diharapkan diperoleh data berupa data Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah eksisting dan informasi penting lainnya bermanfaat sebagai basis data bagi pengembangan infrastruktur dan penataan ruang di kawasan tersebut. Kegiatan PTPR sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Survei Lapangan, Pengolahan Data hingga Pelaporan dan Penyerahan Hasil kegiatan PTPR kepada para *stakeholder*.

Sehingga Aksi Perubahan yang dipilih adalah **“OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG MELALUI INTEGRASI DENGAN GeoKKP (PILOT PROJECT PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG GEOPARK/GEOSITE BELITONG)”**.

B. Tujuan

Aksi Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja pada Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang dalam rangka menunjang kinerja Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dan seterusnya Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang sampai dengan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

1) Tujuan Jangka Pendek

- a. *Pilot Project* Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Geopark/Geosite Belitong dengan GeoKKP.
- b. Tersedianya Buku Panduan *Mobile Application* SiPetik, Geoportal Tematik dan Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP.
- c. Tersedianya anggaran dalam DIPA untuk pengembangan geoportal tematik terkait kegiatan integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) ke sistem GeoKKP, untuk mendukung kegiatan jangka menengah
 - Revisi DIPA
 - Pembuatan KAK dan RAB

2) Tujuan Jangka Menengah

Mengembangkan geoportal tematik yang terintegrasi dengan Geo-KKP melalui sistem *hybrid* geoportal tematik yang menggabungkan *open source* maupun *commercial platform* untuk percepatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial tematik.

3) Tujuan Jangka Panjang

Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang berbasis bidang yang lengkap (*completeness*) dan valid (*reliable*).

C. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini memberi manfaat pada internal dan eksternal.

1. Internal :

- a. Tersedianya data PTPR yang terintegrasi dengan GeoKKP, Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengelola data secara *online* di lingkungan kerja mereka sendiri ;
- b. Terwujudnya kemudahan bagi pengguna, PTPR menjadi Peta Kerja pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang.
- c. PTPR berfungsi sebagai *basic layer* bagi berbagai aspek administrasi pertanahan sesuai *land management paradigm* yakni *land tenure*, *land use*, *land value*, dan *land development* yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian ATR/BPN 2020-2024.

2. Eksternal :

Data PTPR yang terintegrasi dengan Geo-KKP dalam menampilkan data dan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang dapat digunakan sebagai *basic layer* dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung percepatan kebijakan satu peta pada skala peta yang lebih besar serta adanya layanan berbasis elektronik untuk memfasilitasi pelaksanaan data dan informasi Geospasial bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Kementerian/Lembaga secara mudah, cepat dan akuntabel.

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tugas Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang atau Ditjen II terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang; Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik; Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik.



Bagan 1. Bagan Struktur Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang, kawasan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik.

2. Tugas Fungsi Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada Pasal 208 dijelaskan Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan, persiapan, hasil, penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang

Subdirektorat Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Sampai saat ini belum ditetapkan regulasi lebih detail tentang uraian tugas jabatan struktural.

3. Area Bermasalah

Area bermasalah pada Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang antara lain :

1. Belum lengkapnya cakupan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam seluruh kegiatan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang;
2. Kurangnya memadainya jumlah personil pelaksana dibanding volume pekerjaan yang ditargetkan;
3. Belum tersistematisnya pembuatan tema-tema dari kegiatan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan baik di internal maupun eksternal Kementerian ATR/BPN;
4. Belum terintegrasinya peta tematik pertanahan dan ruang dengan Sistem GeoKKP.

B. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik terdiri dari dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang dan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 orang. Adapun jumlah SDM pada Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah SDM Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

No.	Kualifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
I	PNS	23	
	Pejabat Tinggi Pratama	1	
	Pejabat Administrator	3	
	Jabatan Fungsional	19	
II	PPNPN	9	
Jumlah		31	

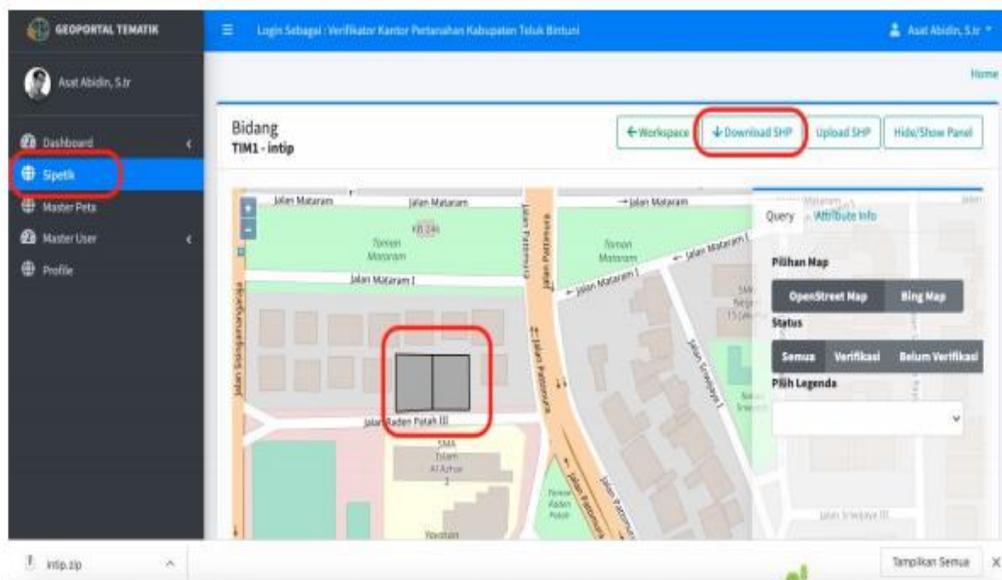
2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik cukup lengkap, baik itu peralatan survei maupun peralatan pengolahan data seperti laptop dan komputer yang telah dilengkapi dengan software berlisensi. Pelaksanaan survei lapangan dan pengolahan data menggunakan Aplikasi SiPetik dan Geoportal Tematik. Aplikasi SiPetik adalah Sistem Informasi Survei dan Pemetaan Tematik, berupa aplikasi *mobile surveys* berbasis android yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengumpulan Data dan Informasi. SiPetik berfungsi sebagai perangkat (tool) untuk kegiatan Survei dan pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang dalam hal pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilapangan, SiPetik ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat karena data yang diambil di lapangan dapat terpantau secara *real time*.



Gambar 2. Aplikasi SiPetik Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Hasil survei di *App Mobile Surveys Sipeitik* dapat di lihat menggunakan Geoportaltematik. Fungsi Geoportaltematik sebagai ruang kerja untuk menampilkan, mengakses dan mendownload data hasil survei lapangan untuk kemudian di olah pada tahapan selanjutnya menggunakan perangkat pengolah data (ArcGis, QGis, K-Gis dll).



Gambar 3. Geoportaltematik Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Memperhatikan uraian area bermasalah pada Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang, diketahui terdapat empat area yang bermasalah. Permasalahan tersebut tentunya tidak baik dibiarkan berlarut karena dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu dilakukan analisa dengan cara menyusun urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu menggunakan manajemen USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Melalui USG dapat ditentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Analisa identifikasi masalah pada area yang bermasalah pada Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang dengan menggunakan metode manajemen USG dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Matriks Identifikasi Masalah dengan Metode USG

No	Isu Strategis/Masalah	Penilaian Kriteria			Total Nilai
		U	S	G	
1	Belum lengkapnya cakupan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam seluruh kegiatan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang	4	4	5	13
2	Kurangnya memadainya jumlah personil pelaksana dibanding volume pekerjaan yang ditargetkan	3	4	4	11
3	Belum tersistematisnya pembuatan tema-tema dari kegiatan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan baik di internal maupun eksternal Kementerian ATR/BPN	4	4	4	12
4	Belum terintegrasinya peta tematik pertanahan dan ruang dengan Sistem GeoKKP	5	4	5	14

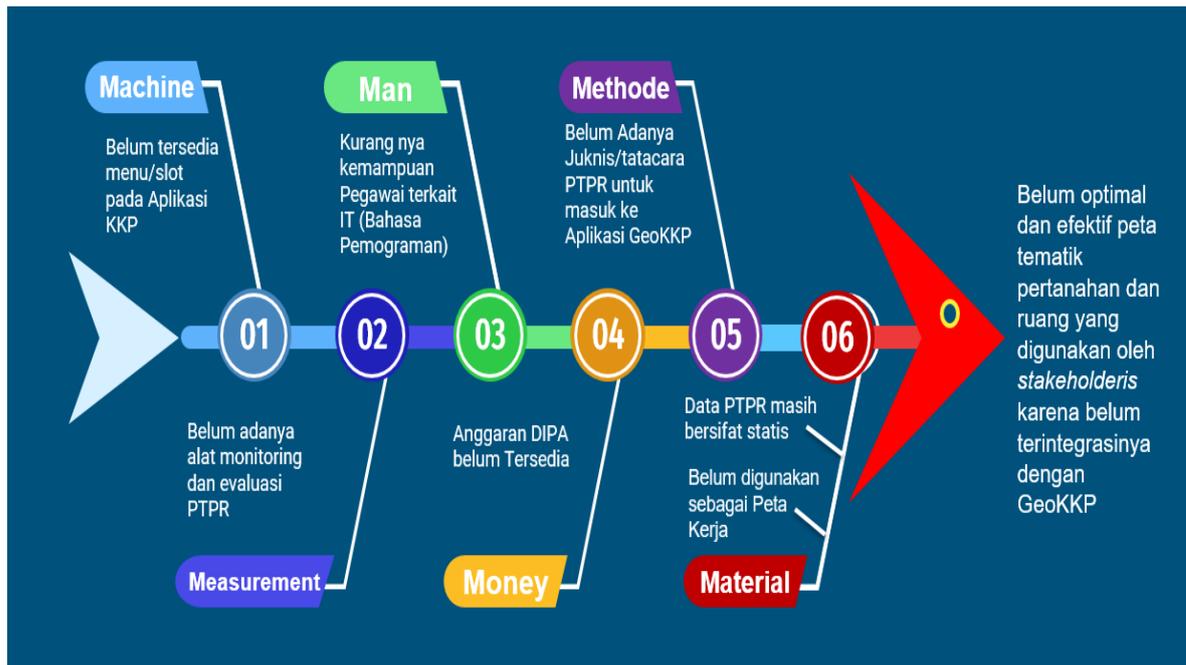
Keterangan :

- **Berdasarkan skala likert** 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)
- **Kriteria Penilaian :**
 - Urgency* : seberapa mendesak isu dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah.
 - Seriousness* : seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.
 - Growth* : seberapa besar kemungkinan isu akan berkembang jika tidak ditangani semestinya

Melalui analisa masalah dengan menggunakan analisa USG diperoleh satu permasalahan yang mempunyai skala penilaian tertinggi yaitu poin nomor 4 dimana belum terintegrasinya peta tematik pertanahan dan ruang dengan Sistem GeoKKP. Berdasarkan identikasi dan analisa tersebut, maka permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah “belum optimal dan efektif peta tematik pertanahan dan ruang yang digunakan oleh para *stakeholders* karena belum terintegrasinya dengan GeoKKP”.

B. Penetapan Masalah Utama

Melalui identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu, yaitu belum terintegrasinya peta tematik pertanahan dan ruang dengan Sistem GeoKKP. Selanjutnya terhadap permasalahan tersebut dilakukan identifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebabnya. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakan teknik analisis manajemen diagram fishbone. Diagram ini dapat menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Identifikasi masalah menggunakan diagram fishbone dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Diagram *Fishbone* Penetapan Masalah Utama

Melalui analisa diagram *fishbone* di atas dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimal dan efektif peta tematik pertanahan dan ruang yang digunakan oleh *stakeholder* karena belum terintegrasi. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Belum tersedia menu/slot pada aplikasi KKP untuk kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang. Belum ada koneksi *host to host* antara geoportal tematik dengan aplikasi KKP (*Machine*).
2. *Users* atau pegawai di Kantah atau Kanwil sudah terbiasa menggunakan GeoKKP dalam kegiatan rutin dan sudah terbiasa dengan peta pendaftaran di KKP. *Users* belum begitu mengenal atau terbiasa dengan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (*Man*).
3. Belum tersediaanya Juknis atau tatacara para *users* di Kantah, Kanwil maupun Pusat yang mengatur tatacara memasukan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang ke Aplikasi GeoKKP (*Methode*).
4. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang masih bersifat statis, belum ada metode khusus dimana ada proses *updating* secara otomatis. Selain itu Peta Tematik Pertanahan dan Ruang belum digunakan di Kantah sebagai peta kerja/*basic layer* bagi berbagai macam fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan (sebagai bagian dari alat bantu “*Medical Chekup*”) untuk mendukung Satu Peta di Kemeterian ATR/BPN yang lengkap (*completeness*) dan valid (*reliable*) (*Material*).

5. Saat ini belum tersedianya anggaran dalam DIPA Dirjen SPPR untuk proses terintegrasinya PTPR dengan GeoKKP (*Money*).
6. Belum adanya alat monitoring dan evaluasi terkait efektifitas penggunaan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang secara otomatis (*Measurement*).

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Inovasi merupakan satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Analisis Kelayakan Inovasi pada penulisan ini menggunakan inovasi model kanvas. Kanvas model merupakan salah satu instrumen atau alat bantu bagi peserta untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis, dan merancang tugas dan fungsi, program dan kegiatan dan rencana inovasi organisasi. berperan sebagai model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan nilai-nilai organisasi dan memungkinkan implementasinya dalam bentuk *visual chart*.

<p style="text-align: center;">Mitra Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Dit SPT • Pusdatin • ULP • Pihak Ketiga 	<p style="text-align: center;">Kegiatan Utama</p> <p>Pengintegrasian PTPR ke Dalam GeoKKP</p>	<p style="text-align: center;">Nilai Yang Ditawarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Updating PTPR bersifat Otomatis • Sebagai peta kerja/<i>basic layer</i> terkait fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan • Mendukung Satu Peta yang lengkap dan valid 	<p style="text-align: center;">Hubungan Klien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitra Kerja • Koordinasi • Konsultasi • Pelayanan Publik 	<p style="text-align: center;">Target</p> <p>User pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p>
	<p style="text-align: center;">Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM • Anggaran 		<p style="text-align: center;">Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudah, cepat dan efisien • Terintegrasi 	
<p style="text-align: center;">Unsur Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIPA 2021 	<p style="text-align: center;">Imbalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Kinerja 		<p style="text-align: center;">Resiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang Optimalnya Pihak Ketiga • Kurang Optimalnya Supervisi 	
<p style="text-align: center;">Legalitas</p> <p>Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian ATR/BPN</p>	<p style="text-align: center;">Akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan dan Penyelesaian Pekerjaan • Monitoring dan Evaluasi 		<p style="text-align: center;">Sustainabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibuatkan Roadmap Kegiatan • Komitmen/Konsistensi/Pakta Integritas 	

Gambar 5. Kanvas Model Analisis Kelayakan Inovasi

Kelayakan inovasi ini adalah dalam hal menghasilkan produk yang aktual dan memang dibutuhkan kehadirannya. Kelayakan inovasi Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP adalah sebagai berikut :

1. Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP belum pernah dilakukan sebelumnya. Peta-peta tematik sampai saat ini belum ada yang terintegrasi dengan GeoKKP.
2. Bermanfaat dan membantu *updating* data PTPR bersifat otomatis, sebagai peta kerja/*basic layer* terkait fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan dan mendukung Satu Peta yang lengkap dan valid.
3. Memberikan solusi dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur data/informasi dan juga membantu sebagai bagian dari alat bantu "*Medical Chekup*" kegiatan administrasi pertanahan, misalnya: membantu mengidentifikasi bidang K4, mengidentifikasi masalah pertanahan, dsb.
4. Akan selalu berkesinambungan karena data yang tidak hanya lengkap (*completeness*) tetapi akan digantikan juga dengan data valid (*reliable*).
5. Dapat dijadikan percontohan untuk mengintegrasikan data/peta lain dengan GeoKKP.
6. Tidak bertentangan dan melanggar sistem yang ada. Justru sebaliknya melalui kegiatan ini dapat mewujudkan pelayanan pertanahan yang sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

BAB IV

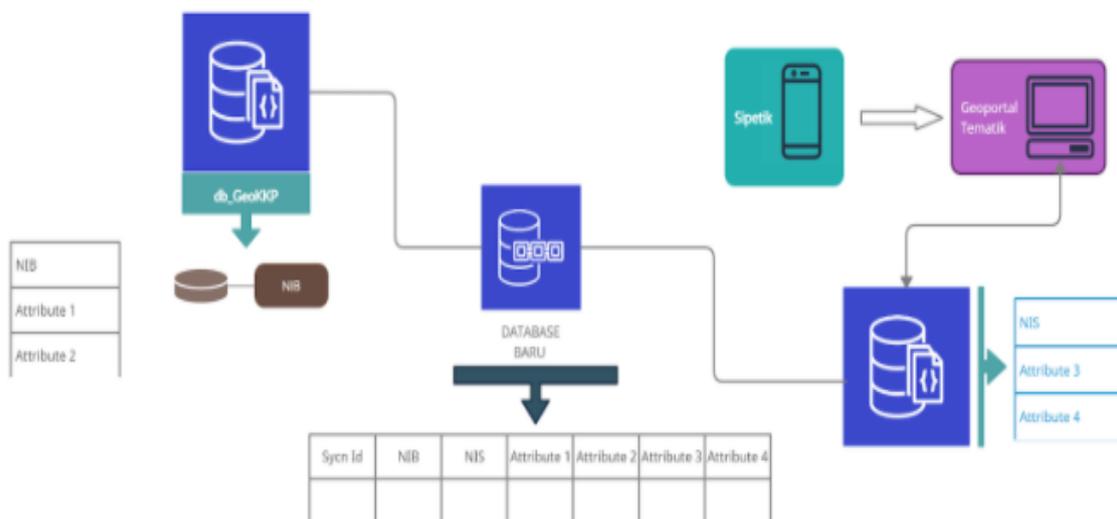
STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah.

Pada Aksi Perubahan ini, masalah prioritas yang dipilih untuk ditangani adalah “belum optimal dan efektif peta tematik pertanahan dan ruang yang digunakan oleh para *stakeholders*”. Untuk mengatasi masalah tersebut, alternatif strategi penanganan yang akan dilaksanakan adalah melakukan Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP.

Peta Tematik Pertanahan dan Ruang yang ter-upload melalui Geoportal Tematik untuk dievaluasi meliputi kompilasi data, integrasi, restrukturisasi data, input data, verifikasi, dan validasi. Data-data yang telah sesuai akan disimpan dan dikelola di dalam basis data terpusat dan dipublikasikan sesuai hak akses, baik untuk kebutuhan internal maupun publik melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Proses Pengembangan Geoportal Tematik yang terintegrasi dengan GeoKKP dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 6. Proses PTPR yang terintegrasi dengan GeoKKP

Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengelola data secara *online* di lingkungan kerja mereka sendiri. Sistem yang dikembangkan juga memfasilitasi setiap Satker pada Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkan data yang ada dan melakukan aktivitas operasional dengan perangkat lunak produksi data, portal, aplikasi dan basis data. Publik juga dapat memanfaatkan data-data yang tersedia serta melalui aplikasi yang dibuka untuk publik. Kegiatan ini mengembangkan geoportal tematik yang terintegrasi dengan Geo-KKP melalui sistem *hybrid* geoportal tematik yang menggabungkan *open source* maupun *commercial platform* untuk percepatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial di Indonesia

B. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan implementasi rencana aksi perubahan, tahapan kegiatan akan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Jangka pendek, dilakukan pada kurun waktu *off-campus* (2 bulan), meliputi:
 - 1) Persiapan : membentuk tim kerja dan melaksanakan rapat efektif;
 - 2) *Pilot Project* Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Geopark/Geosite Belitong dengan GeoKKP.
 - 3) Tersedianya Buku Panduan *Mobile Application* SiPetik, Geoportal Tematik dan Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP.
 - 4) Tersedianya anggaran dalam DIPA untuk kegiatan pengembangan geoportal tematik terkait integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) ke sistem GeoKKP, untuk mendukung kegiatan jangka menengah.
 - Revisi DIPA
 - Pembuatan KAK dan RAB
2. Jangka Menengah, kegiatan yang dilakukan hingga akhir tahun anggaran (bulan 8 s/d bulan 12).
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Supervisi kegiatan
 - 3) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap *Users*.

3. Jangka Panjang, dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya :

- 1) Membangun komunikasi efektif dengan setiap Unit Produksi IGT, Unit Pengelola IGT dan Unit Penyebarluasan IGT sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tabel 4. Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

No	Tahapan	Minggu Ke								Hari	Output	
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Persiapan											
	Pembentukan Tim										5	SK Tim
	Melaksanakan Rapat Tim Efektif										2	Notulen Rapat, Dokumentasi
2.	Merumuskan usulan kegiatan Pembahasan terkait Revisi DIPA										3	Notulen Rapat, Dokumentasi
	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)										9	KAK dan RAB (Tertandatangani), Dokumentasi Kegiatan
3.	<i>Pilot Project</i> integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Geopark/Geosite Belitong terhadap GeoKKP										30	Dokumentasi Kegiatan
4	Tersedianya Buku Panduan <i>Mobile Application</i> SiPetik, Geoportal Tematik dan Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP										15	Dokumentasi Kegiatan

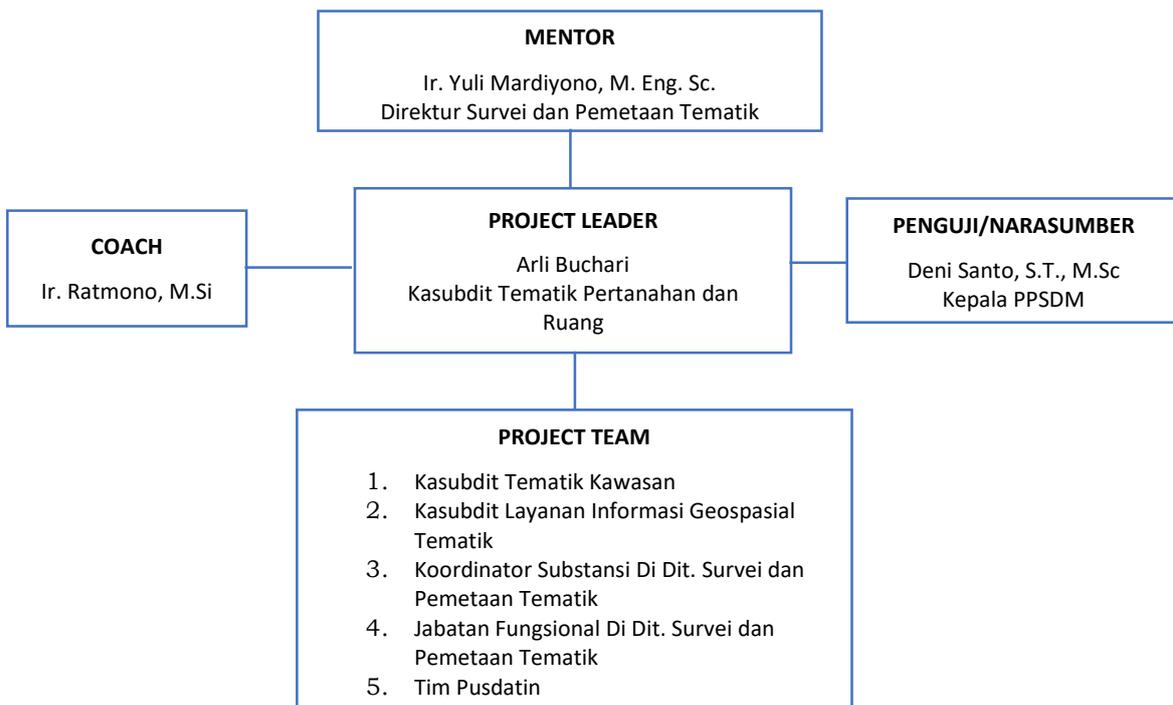
Tabel 5. Rencana Tahapan Kegiatan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

No	Tahapan	Bulan						Tahun 2022	Output
		7	8	9	10	11	12		
1.	Jangka Menengah								
	Pelaksanaan Kegiatan								Dokumentasi Kegiatan
	Supervisi								Laporan Supervisi dan dokumentasi
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis								Dokumentasi Kegiatan
2.	Jangka Panjang								
	Membangun komunikasi efektif dengan setiap Unit Produksi IGT, Unit Pengelola IGT dan Unit Penyebarluasan IGT								

C. Pemanfaatan Sumber Daya

1. Tim Kerja

Sumberdaya yang dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi perubahan terdiri dari pegawai yang unit organisasinya memiliki keterkaitan erat dengan rencana aksi perubahan ini. Adapun susunan Tim Efektif yang dilibatkan seperti pada Bagian 2.



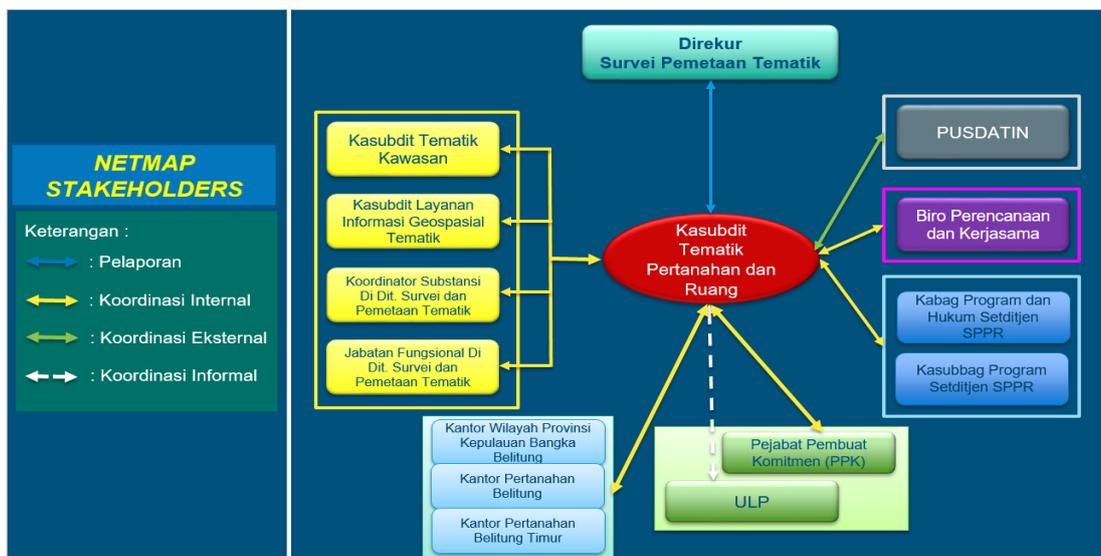
Bagian 2. Tim Kerja Aksi Perubahan

Deskripsi peran dalam aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. *Coach* berperan memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada *Project Leader* selama Aksi Perubahan berlangsung.
2. Mentor berperan mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
3. *Project Leader* bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan kesuksesan aksi perubahan.
4. *Project Team* berperan dalam mendukung terlaksananya aksi perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam jabatan masing-masing.
5. Narasumber memiliki peran untuk memfasilitasi dan menjadi pendamping *Project Team* dalam rangka menetapkan kriteria teknis.
6. Penguji memiliki peran untuk mengevaluasi rencana dan implementasi aksi perubahan serta memberikan masukan kepada *Project Team* dalam rangka bagaimana implementasi berjalan sebagaimana tujuan aksi perubahan.

2. Jejaring Kerja

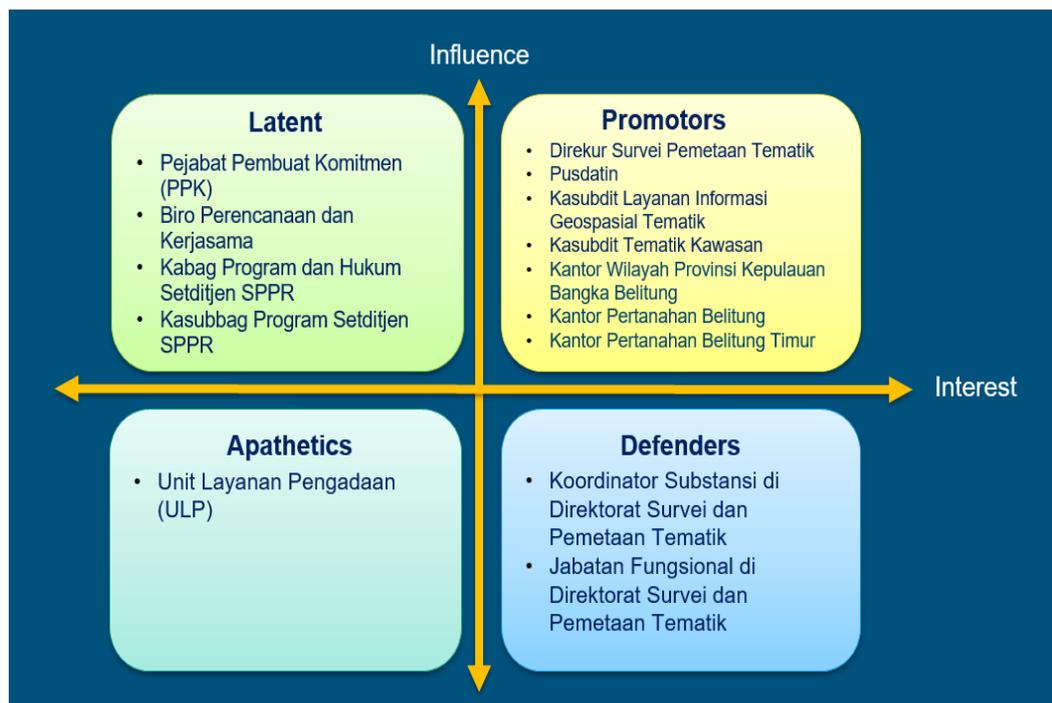
Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.



Gambar 7. Netmap Stakeholders

Melalui struktur jejaring kerja di atas terlihat beberapa *stakeholders* yang berperan dan terlibat dalam kegiatan aksi perubahan ini. Secara umum *stakeholders* tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal merupakan pihak-pihak yang berada dilingkungan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik. Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah pihak-pihak yang berad di luar Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik.

Berdasarkan indentifikasi terdapat stakeholder yang memiliki keterkaitan atau kepentingan pada aksi perubahan ini, yang intensitasnya bersifat dinamis mengikuti jangka waktu pelaksanaan. Pemetaan keterkaitan stakeholder tersebut dilakukan melalui Bagan Analisa *Stakeholders*, dengan melakukan *Clustering Stakeholders*. Hasilnya akan memperlihatkan posisinya masing-masing berdasarkan kuadran, seperti pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Bagan Analisa *Stakeholders*

Penjelasan terhadap Bagan Analisa *Stakeholders* adalah sebagai berikut :

- a. *Promoters Cluster* adalah *cluster stakeholders* yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan minat juga tinggi.
- b. *Defenders Cluster* adalah *cluster stakeholders* yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi

kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah.

- c. *Latents Cluster* adalah *cluster stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah.
- d. *Apathetics Cluster* adalah *cluster stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah.

D. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Manajemen Risiko adalah bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan yang baik di tiap tingkatan organisasi. (Elly Fariani, 2020). Penanganan risiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas risiko-risiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga (*risk sharing*) dan menerima risiko (*risk acceptance*).

Terdapat beberapa risiko yang telah diidentifikasi berkaitan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan, antara lain:

1. Terkait substansi aksi perubahan, akan adanya perbedaan kedalaman pemahaman substansi karena keterbatasan waktu dan ruang untuk menjelaskan yang mungkin akan menghambat pencapaian output.
2. Kondisi pandemi covid-19 dimana semua orang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru berpotensi akan membuat koordinasi secara internal dan eksternal menjadi hambatan komunikasi

Manajemen risiko dan mitigasi risiko pada Rancangan Aksi Perubahan pada jangka pendek dapat dijelaskan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Potensi Hambatan dan Mitigasi Risiko

No	Tahapan Jangka Pendek	Potensi Hambatan	Mitigasi Risiko
1	Persiapan		
	Pembentukan Tim	Koordinasi yang terbatas karena masa pandemi dan kesibukan melaksanakan tugas lain	Membuat grup Tim di Media Sosial untuk memudahkan Koordinasi
	Melaksanakan Rapat Tim Efektif	Pelaksanaan rapat tidak semua anggota dapat menghadiri dan kemungkinan pemahaman yang berbeda	Media <i>Video Conference</i> dapat digunakan sebagai media rapat dan membuat catatan poin-poin penting yang akan ditindaklanjuti
2	Merumuskan usulan kegiatan Pembahasan terkait Revisi DIPA	Anggaran tersedia dari output lain, tetapi belum tentu disetujui oleh Sesditjen SPPR dan Biro Perencanaan untuk di pindah	Meyakinkan seluruh <i>stakeholders</i> terkait pentingnya kegiatan ini
	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)	Perlunya penyamaan persepsi dan pemahaman terkait teknis kegiatan integrasi antara tim tematik dan tim pusdatin	Melaksanakan rapat dan pertemuan antara tim tematik dan tim pusdatin
3	<i>Pilot Project</i> integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang GeoPark/Geosite Belitong dengan GeoKKP	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Verifikasi Data dengan Kanwil dan Kantah • Kesibukan Tim Pusdatin 	Melaksanakan rapat secara intensif
4	Tersedianya Buku Panduan <i>Mobile Application</i> SiPetik, Geoportal Tematik dan Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP	Penyamaan persepsi dan pemahaman terkait teknis kegiatan in	Melaksanakan rapat dan pertemuan seluruh <i>stakeholders</i>

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pemimpin yang berintegritas selalu berpikir dan akan bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Kepemimpinan yang dibangun atas kekuatan berpikir dengan kebiasaan yang produktif, yang dilandasi oleh kekuatan moral, akan menjadikan pemimpin tersebut memiliki “integritas” untuk bersikap dan berperilaku yang baik sehingga ia mampu memberikan keteladanan dan juga mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan. Integritas dapat dibangun melalui penerapan kepemimpinan transformasional dalam memimpin suatu organisasi.

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi yang dilaksanakan selama proses *off class* untuk implementasi aksi perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan :

a. Persiapan

1. Pembentukan Tim Aksi Perubahan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Survei Dan Pemetaan Tematik Nomor 69/SK-300.17.ST.01/IV/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang Melalui Integrasi Dengan GeoKKP.

Koordinasi dan konsultasi dengan mentor, *stakeholder*, dan juga *coach* dalam menyamakan persepsi, menggali ide dan gagasan serta kesepakatan bersama untuk menunjang capaian aksi perubahan.



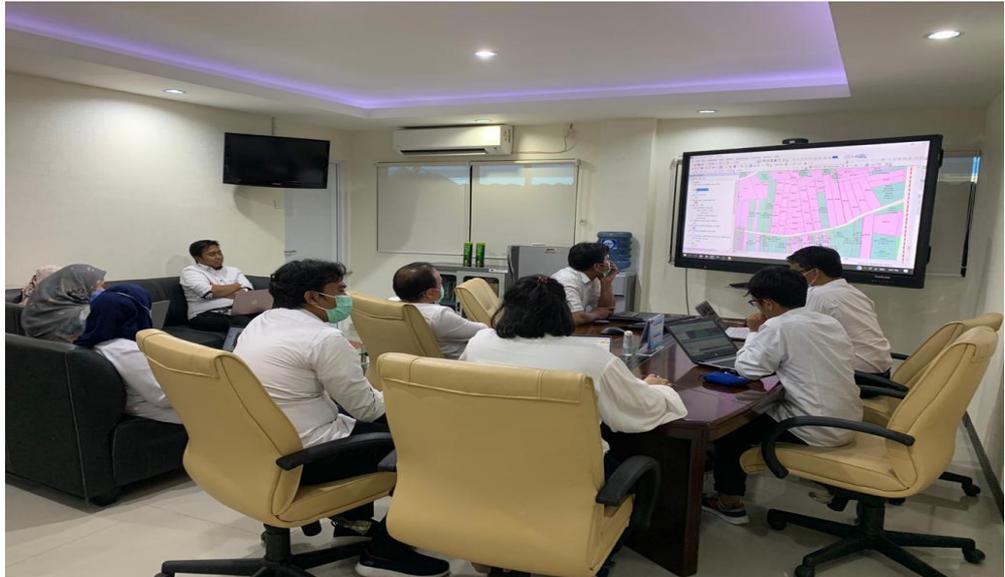
Gambar 9. Koordinasi dan Konsultasi dengan *Stakeholders*

b. Pelaksanaan

1. Merumuskan Rencana Kegiatan

Melaksanakan rapat pembahasan dengan Tim Aksi Perubahan dalam rangka menyusun langkah-langkah teknis untuk mendukung kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang melalui Integrasi dengan GeoKKP. Rapat Pembahasan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan Tim Aksi Perubahan dan menyusun langkah-langkah teknis dalam rangka menyusun :

- *Pilot Project* integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang GeoPark/Geosite Belitong terhadap GeoKKP.
- Membuat modul panduan/tatacara integrasi data PTPR dengan GeoKKP.
- Merumuskan usulan kegiatan Pembahasan terkait Revisi DIPA dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk mendukung kegiatan jangka menengah.

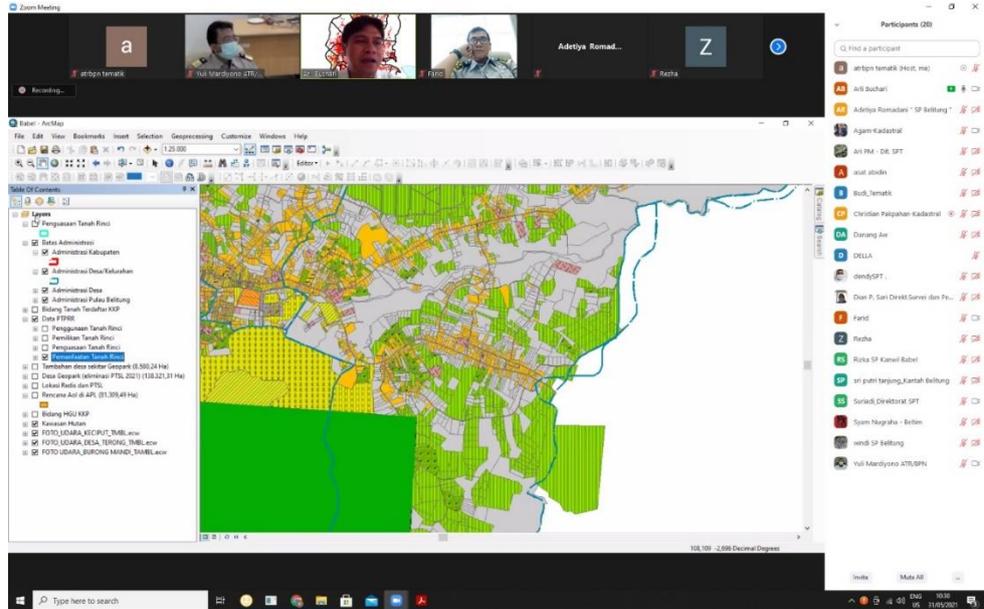


Gambar 10. Rapat Dengan Tim Aksi Perubahan

2. Melaksanakan Rapat Teknis dan Sosialisasi dengan *Stakeholders*

Pelaksanaan rapat teknis dan sosialisasi kegiatan dimaksudkan untuk menyampaikan maksud dan manfaat dari kegiatan ini, sehingga tujuan dari kegiatan dapat tercapai.

- Melaksanakan Rapat Teknis dengan Pusdatin, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kanwil Provinsi BPN Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pertanahan Belitung, Kantor Pertanahan Belitung Timur untuk menyamakan Presepsi terkait integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Geopark/Geosite Belitung terhadap GeoKKP.
- Melaksanakan Rapat Teknis dengan Tim Teknis Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dalam rangka menyusun modul penggunaan SiPetik dan Geoportal Tematik serta tatacara integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP.
- Melaksanakan Rapat Teknis dengan Kabag Program dan Hukum dan Kasubbag Program terkait usulan Revisi DIPA untuk memasukan kegiatan pembangunan sistem dan mengusulkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk mendukung kegiatan jangka menengah.



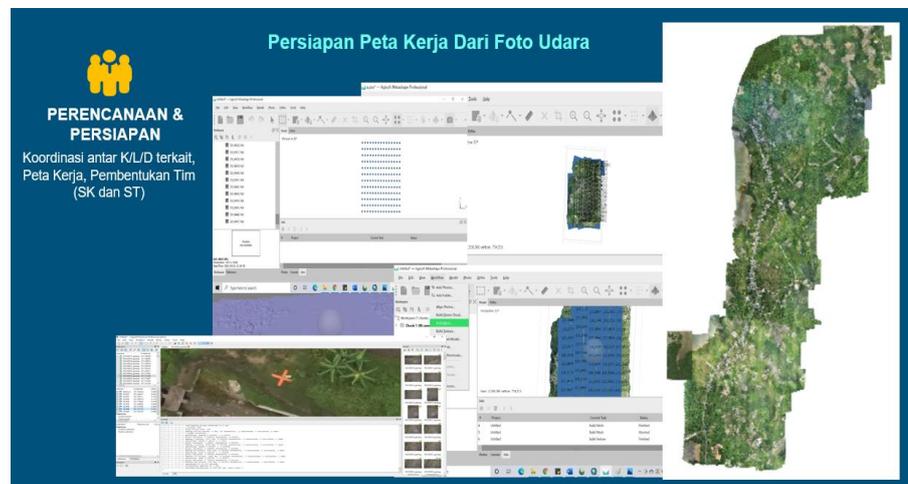
Gambar 11. Rapat Teknis dan Sosialisasi dengan *Stakeholders*

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pada kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang berbeda sesuai dengan tupoksinya:

a) Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Geopark/Geosite Belitong terhadap GeoKKP

- Kegiatan PTPR sendiri merupakan sebuah kegiatan yang merupakan suatu rangkaian mulai dari Perencanaan dan Persiapan, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Survei Lapangan, Pengolahan Data hingga Pelaporan dan Penyerahan Hasil.



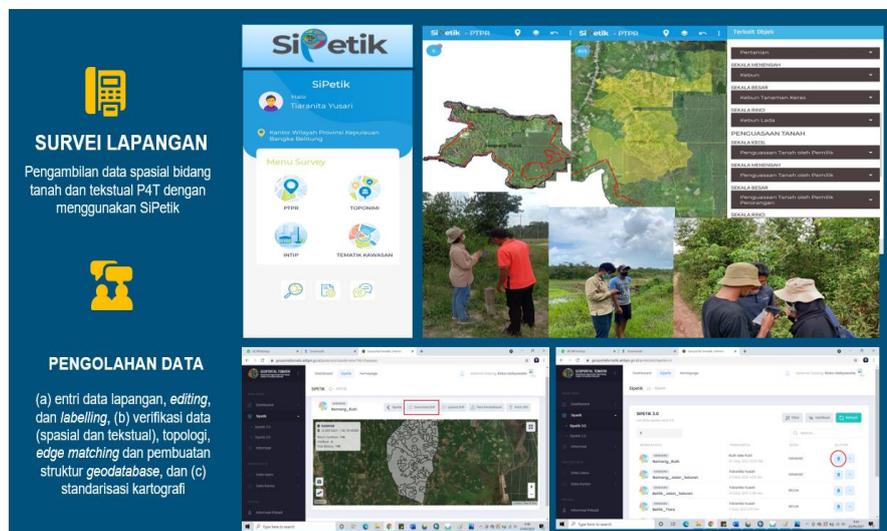
Gambar 12. Contoh Persiapan Peta Kerja



Gambar 13. Sosialisasi dan Koordinasi Dengan Stakeholder



Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan



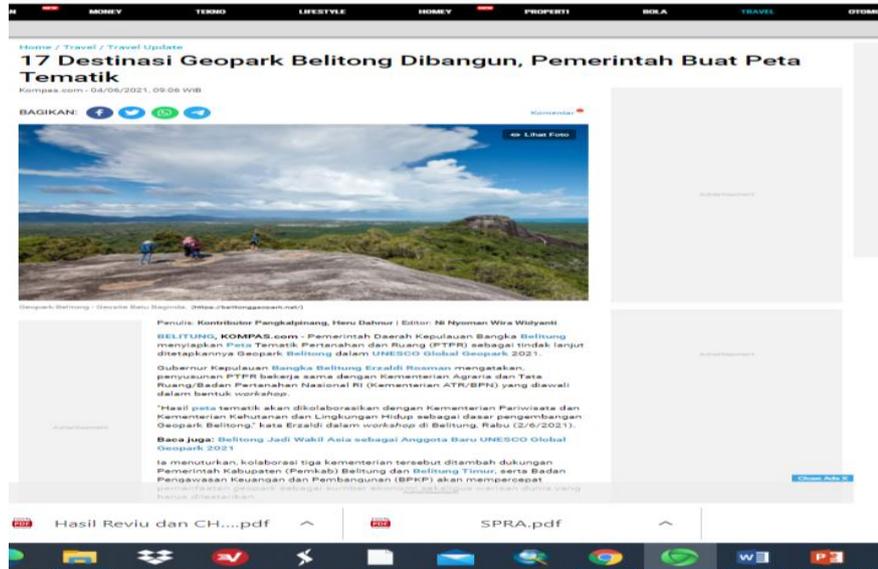
Gambar 15. Pelaksanaan Survey Lapangan Dan Pengolahan Data

- Pelaksanaan kegiatan integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang ke dalam GeoKKP oleh petugas dari Kantor Pertanahan Belitung dan Kantor Pertanahan Belitung Timur.

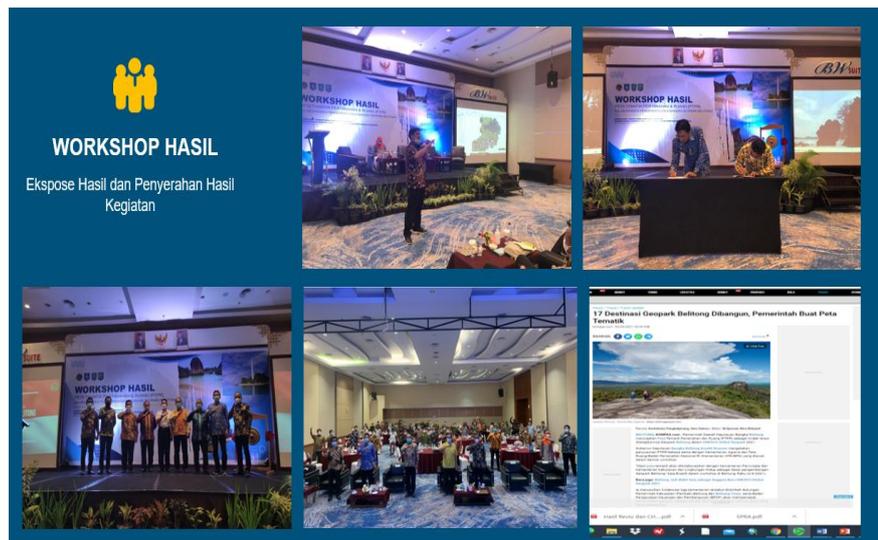


Gambar 16. Pelaksanaan kegiatan integrasi PTPR ke dalam GeoKKP

- Workshop Hasil Peta Tematik Pertanahan dan Ruang di Hotel BW Suite, Tanjungpandan, 2-4 Juni 2021, yang melibatkan stakeholder dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Badan Pengelola Geopark Belitong serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (berdasarkan Surat Undangan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 59/Und-300.17/ST-01/V/2021 tanggal 28 Mei 2021).

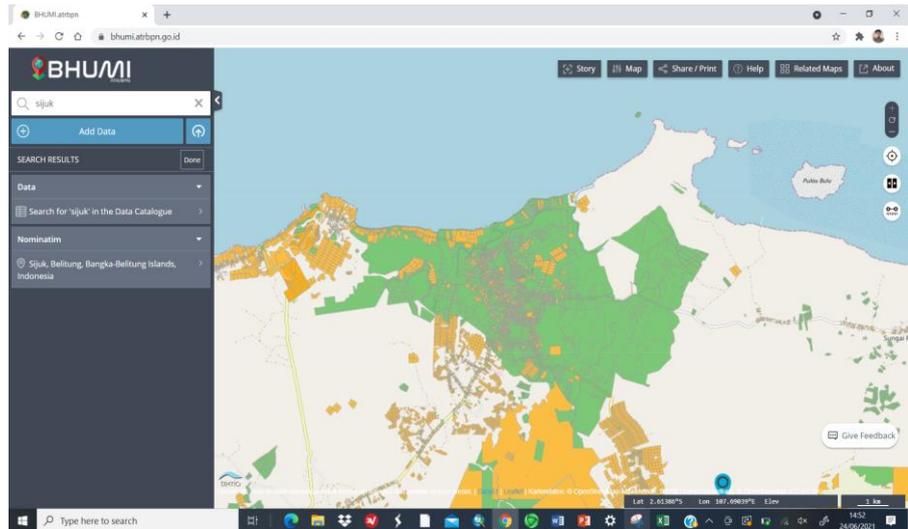


Gambar 17. Berita Kegiatan Pemetaan Tematik Geopark



Gambar 18. *Workshop* Hasil Peta Tematik Pertanian

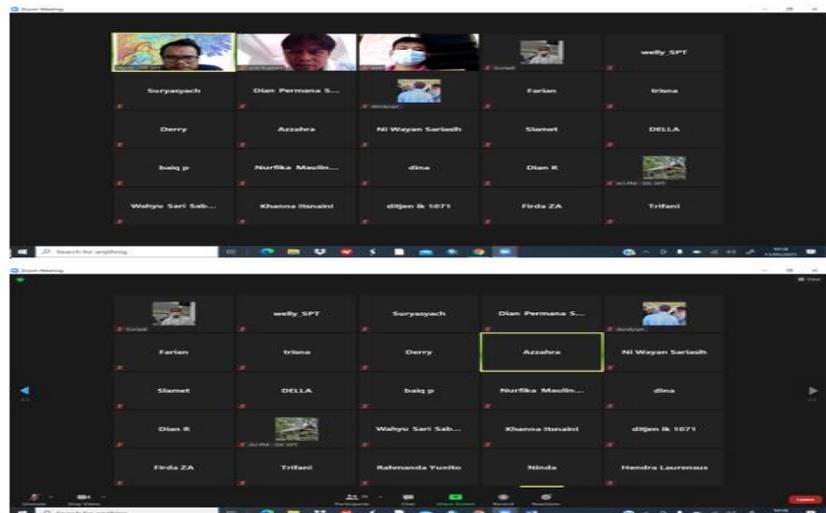
- Untuk melihat hasil pelaksanaan kegiatan integrasi Peta Tematik Pertanian dan Ruang ke dalam GeoKKP dapat di akses <https://bhumi.atrbpn.go.id/>



Gambar 19. Contoh hasil integrasi PTPR ke dalam GeoKKP

b) Tersedianya Buku Panduan *Mobile Application* Sipetik, Geoportal Tematik dan Integrasi PTPR dengan GeoKKP.

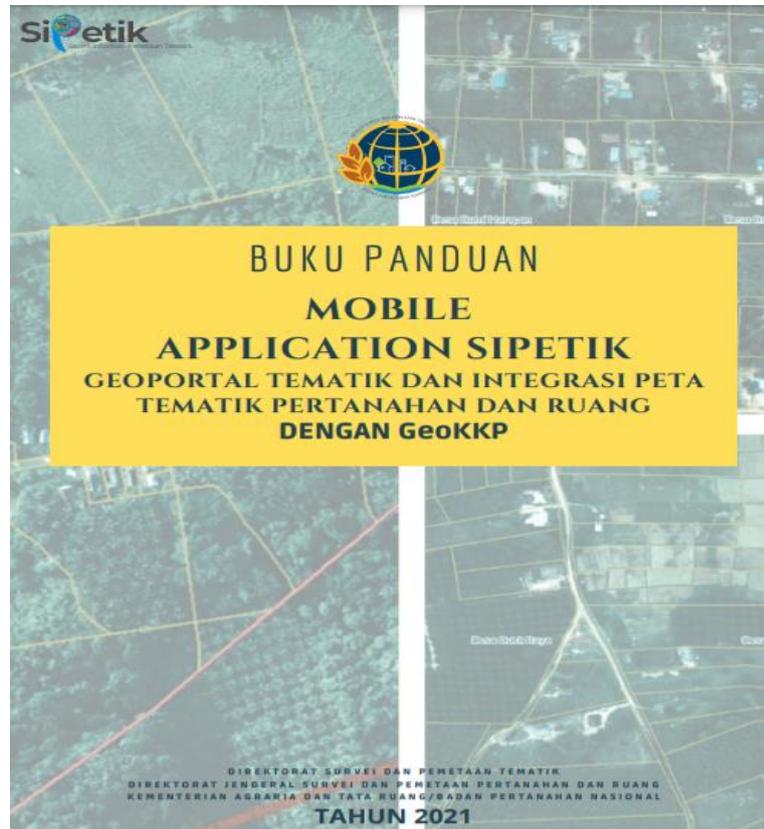
- Melaksanakan Rapat Teknis dengan Tim Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dalam rangka membuat modul panduan/tatacara integrasi data PTPR dengan GeoKKP.



Gambar 20. Rapat Teknis Penyusunan Buku Panduan

- Dalam pelaksanaannya, modul tidak hanya memuat tatacara integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang dengan GeoKKP tetapi memuat juga tatacara penggunaan SiPetik dan Geoportal Tematik.

- Buku Panduan di terbitkan dengan pengantar dari Direktur Survei dan Pemetaan Tematik pada tanggal 25 Juni 2021.



Gambar 21. Buku Panduan

- c) Tersedianya anggaran dalam DIPA untuk pengembangan geoportals tematik terkait kegiatan integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) ke sistem GeoKKP, untuk mendukung kegiatan jangka menengah
- Usulan Penambahan anggaran kegiatan dengan Nota Dinas Direktur Survei dan Pemetaan Tematik terkait Optimalisasi Anggaran Nomor 38/ND-300.17.ST.01/III/2021 tanggal 19 Maret 2021
 - Review internal dengan Inspektorat Jenderal (APIP), Biro Perencanaan dan Kerja Sama, dan Biro Keuangan dan BMN, yang dituangkan dalam Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal 185/ND-900.40/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Hasil *Review* Anggaran.

- Review eksternal dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 24 Mei 2021 (persetujuan Revisi DIPA).



Gambar 22. Review Eksternal dengan Direktorat Jenderal Anggaran

- Pengesahan Revisi Anggaran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-333/AG/AG.3/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2021 Unit Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN. Tersedia anggaran sebesar Rp. 487.707.000,- untuk pengembangan geoportal tematik terkait kegiatan integrasi PTPR ke sistem GeoKKP.

Matriks Revisi Anggaran													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN													
TAHUN ANGGARAN 2021													
KEMENTERIAN					KEMENTERIAN								
: (056) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN					: (056) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN								
UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG					UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG								
PROGRAM : (054 (4 CS) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN					PROGRAM : (054 (4 CS) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN								
SATUAN KERJA : (53410) DITEN SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG					SATUAN KERJA : (53410) DITEN SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG								
PROVINSI : (01) DKI JAKARTA					PROVINSI : (01) DKI JAKARTA								
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT					LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT								
SEMULA					MENJADI								
Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
5544.F4B	Sistem Informasi Pemerintahan	2,060,000	Sistem		3,359,534,000		5544.F4B	Sistem Informasi Pemerintahan	2,060,000	Sistem		3,359,534,000	
5544.F4B.001	PENGELOLAAN DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) PERTANAHAN DAN RUANG	2,060,000	Laporan		3,359,534,000		5544.F4B.001	PENGELOLAAN DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) PERTANAHAN DAN RUANG	2,060,000	Laporan		3,359,534,000	
051	Pengumpulan dan Penyusunan Bahan				574,360,000		051	Pengumpulan dan Penyusunan Bahan				624,107,000	
A	TANPA SUB-KOMPONEN				574,360,000		A	TANPA SUB-KOMPONEN				624,107,000	
521211	Belanja Bahan				92,700,000	PNBP	521211	Belanja Bahan				63,900,000	PNBP
	-Konsumsi Rapat (30 org x 5 kg x 2 kali)	300	ORG/K	69,000	20,700,000			-Konsumsi Rapat (30 org x 5 kg x 1 kali)	100	ORG/K	69,000	6,900,000	
	-Seminar K/I (48 org x 5 kg)	240	OP	300,000	72,000,000			-Seminar K/I (38 org x 5 kg)	190	OP	300,000	57,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				275,000,000	PNBP	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				72,500,000	PNBP
	- ATK (1 pkt x 5 kg)	5	PKT	20,000,000	100,000,000			- ATK (1 pkt x 5 kg)	5	PKT	7,000,000	35,000,000	
	-Bahan Penunjang Komputer (1 pkt x 5 kg)	5	PKT	35,000,000	175,000,000			-Bahan Penunjang Komputer (1 pkt x 5 kg)	5	PKT	7,500,000	37,500,000	
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri				206,560,000	PNBP	524211	Belanja Modal Lainnya				487,707,000	PNBP
	>>> Reningkatkan Kapasitas Pengelolaan Data ICT Pertanahan dan Ruang				206,560,000			>>> Pengembangan Geoportals Tematik				487,707,000	
	>>> ESRI User Conference, San Diego, California				206,560,000			>>> Pengembangan Geoportals Tematik Dalam Rangka Pengelolaan Data ICT Pertanahan dan Ruang	1	PKT	487,707,000	487,707,000	
	-Registration fee (4 org)	4	OP	7,000,000	28,200,000								
	-Tiket Pesawat Jakarta- Lokasi PP (4 org)	4	OT	44,640,000	178,560,000								

Gambar 23. Terangarkannya Integrasi PTPR ke GeoKKP

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini dalam kondisi *pandemic covid-19* mengharuskan untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru, yang tentunya akan mengalami perubahan budaya kerja, yaitu *Work From Home* (WFH). Pada masa seperti ini diperlukan pemantauan yang intensif terhadap kerja tim yang efektif sehingga output jangka pendek dalam implementasi aksi perubahan ini dapat tercapai.

Pengelolaan budaya kerja untuk memastikan implementasi aksi perubahan jangka pendek yaitu :

- a. Memberikan pemahaman yang jelas dan diharapkan partisipasi yang aktif dari seluruh *stakeholders*. Partisipasi aktif bisa berjalan dengan baik apabila memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan kegiatan dengan mengefektifkan rapat *online* (*video converence*), dengan memanfaatkan teknologi aplikasi *zoom meeting*.
- b. Mendorong terjadinya dialog dua arah dan senantiasa melakukan *feedback* secara berkesinambungan. Implementasinya adalah dengan membuat grup *Whatsapp* untuk membangun percakapan dan koneksi secara dua arah.
- c. Menggali dan mendorong segala macam ide kreatif dan inovatif serta mendorong pegawai untuk menjadi yang terbaik dengan tetap mencoba memahami berbagai kesalahan untuk kemudian mengarahkan mereka. Selalu dilaksanakan rapat internal secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat solusi penyelesaian apabila ditemukan pemasalahan.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah hal sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan ini. Berikut jejaring kerja dan kolaborasi dalam kegiatan aksi perubahan:

- a. Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pertanahan Belitung dan Belitung Timur adalah *stakeholders* penting dalam kegiatan integrasi PTPR ke dalam GeoKKP, karena kegiatan ini bisa terlaksana apabila ada dukungan dari unit kerja ini dan hasilnya akan sama-sama

bermanfaat untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Komunikasi yang intens selalu dilakukan untuk membangun kesamaan pemahaman.

- b. Tim teknis Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Tim Teknis Pusdatin ATR/BPN, Tim Teknis Kantah Belitung dan Belitung Timur, merupakan tim yang sangat penting dalam hal penyusunan Buku Panduan *Mobile Application* Sipetik, Geoportal Tematik Dan Integrasi PTPR dengan GeoKKP.
- c. Biro Perencanaan, Kabag Program dan Hukum Sesditjen SPPR, Kasubbag program Sesditjen SPPR juga *stakeholders* penting dalam kegiatan revisi DIPA agar kegiatan integrasi PTPR ke dalam GeoKKP bisa di anggarkan untuk Kegiatan Jangka Menengah.



Gambar 24. Koordinasi dengan Para *Stakeholders*

B. Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Ada beberapa capaian perbaikan kinerja organisasi dari kegiatan aksi perubahan ini, yaitu:

- a. Integrasi Peta Tematik Pertanahan dan Ruang terhadap GeoKKP
 - PTPR sudah menjadi satu kesatuan sistem dalam GeoKKP. Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengelola data secara *online* di lingkungan kerja mereka sendiri ;
 - Terwujudnya kemudahan bagi pengguna, PTPR menjadi Peta Kerja/ berfungsi sebagai *basic layer* pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam mengolah,

menganalisis dan menyajikan data dan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang.

- Optimalisasi sumberdaya (SDM dan Anggaran) dalam kegiatan ini, terutama terkait tupoksi tematik di Kanwil dan Kantah. Selama ini kegiatan tematik di Kanwil dan Kantah belum optimal dimana output dalam mendukung kinerja belum jelas. Dengan terintegrasinya dengan GeoKKP maka kinerja fungsi tematik bisa terukur.
- b. Buku Panduan *Mobile Application* Sipetik, Geoportal Tematik dan Integrasi PTPR dengan GeoKKP
- Buku Panduan ini merupakan panduan menggunakan *mobile application* SiPetik (sebagai *field data collector*), Geoportal Tematik (sebagai ruang kerja pengolahan data, verifikasi, dan monitoring hasil survei), serta dalam aspek pengintegrasian data hasil survei Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) ke dalam sistem GeoKKP guna menuju data bidang tanah yang selain *reliable* juga lengkap dalam basis administrasi kewilayahan.
 - Aspek penguatan pengetahuan dan kapasitas para pelaksana pengumpulan data tematik lapangan di bidang pertanahan dan ruang yang terstandarkan dan berbasis pada aplikasi.
- c. Revisi DIPA dengan memasukan anggaran untuk pengembangan sistem integrasi PTPR ke dalam GeoKKP
- Tersediannya anggaran untuk keberlanjutan proses integrasi PTPR ke GeoKKP sehingga tujuan jangka menengah dapat tercapai.
 - Kegiatan ini untuk jangka menengahnya adalah mengembangkan geoportal tematik yang terintegrasi dengan Geo-KKP melalui sistem *hybrid* geoportal tematik yang menggabungkan *open source* maupun *commercial platform* untuk percepatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial di Indonesia.

2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Ada beberapa capaian perbaikan kinerja organisasi dari kegiatan aksi perubahan ini, yaitu:

- Membantu Percepatan penyediaan Informasi Bidang Tanah secara lengkap di seluruh Indonesia (*completeness*), sebagai bahan perencanaan dan kajian pada

unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan dukungan legal akses tata ruang dan pertanahan;

- *Support* untuk kegiatan pertanahan antara lain: legalisasi aset, perbaikan data, peningkatan kualitas data (K4), identifikasi awal sengketa pertanahan, RDTR (tata ruang) dan kegiatannya lainnya.

3. Manfaat Aksi Perubahan

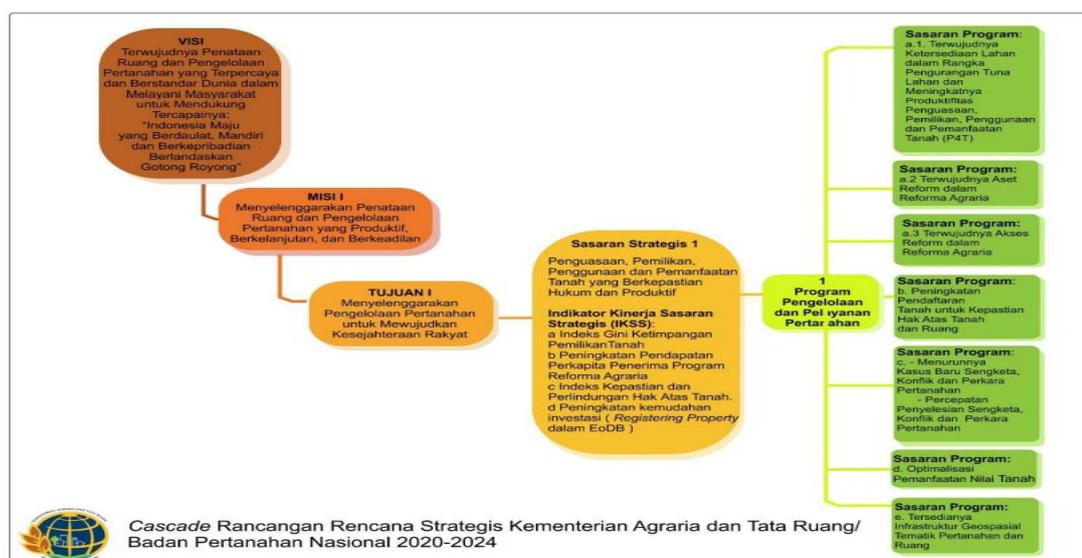
Ada beberapa manfaat yang bisa dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari aksi perubahan ini:

- Penguatan pengetahuan dan kapasitas para pelaksana pengumpulan data dan pengolahan data tematik di bidang pertanahan dan ruang yang terstandarkan.
- Tersedianya Database Bidang Tanah yang *completeness* menuju pelayanan yang terintegrasi.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Legalitas penerapan inovasi aksi perubahan ini harus ditindaklanjuti ke tahap jangka menengah dan jangka panjang karena aksi perubahan ini sangat baik dan sesuai untuk dijadikan solusi dalam perbaikan kinerja organisasi di lingkungan kementerian ATR/BPN. Tujuan dari aksi perubahan ini sejalan dengan salah satu sasaran program Kementerian ATR/BPN, yaitu Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang.



Gambar 25. Cascade Renstra Kementerian ATR/BPN

2. Keberlanjutan Kegiatan Inovasi Dengan Menetapkan Target Jangka Menengah Dan Jangka Panjang

Pelaksanaan inovasi semestinya terlaksana secara berkesinambungan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan aksi perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan kegiatan inovasi jangka menengah, yaitu :
 - Kegiatan untuk jangka menengah adalah mengembangkan geoportal tematik yang terintegrasi dengan Geo-KKP melalui sistem *hybrid* geoportal tematik yang menggabungkan *open source* maupun *commercial platform* untuk percepatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial tematik.
 - Telah tersedia anggaran sebesar Rp. 487.707.000,- untuk kegiatan jangka menengah berdasarkan pengesahan revisi anggaran, Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-333/AG/AG.3/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2021 Unit Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN.

- b. Keberlanjutan kegiatan inovasi jangka panjang, yaitu :

Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang berbasis bidang yang lengkap (*completeness*) dan valid (*reliable*) dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam hal ketersediaan data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dimana kedepannya Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik yang diamanatkan menjadi wali data dan simpul jaringan Informasi Geospasial dapat memberikan data-data berbasis spasial yang *update* dan akurat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Optimalisasi pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang melalui integrasi dengan GeoKKP merupakan tantangan dan sekaligus peluang dalam Agenda Transformasi Digital yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam visinya sebagai institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia. Harapan dengan adanya aksi perubahan ini adalah tersedianya database bidang tanah yang *completeness* menuju pelayanan yang terintegrasi dan adanya penguatan pengetahuan dan kapasitas para pelaksana pengumpul dan pengolah data tematik di bidang pertanahan dan ruang yang terstandarkan.

B. Rekomendasi

Perubahan adalah keniscayaan maka kami menyadari bahwa apa saja yang telah dilaksanakan dalam aksi perubahan ini akan terus berkembang dan rekomendasinya harus ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BUKU DAN DOKUMEN

- 1) Dokumen Rancangan Rencana Strategis / RPJM Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2020, Jakarta;
- 2) Dokumen Rancangan Rencana Strategis Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Tahun 2020 – 2024, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2020, Jakarta;
- 3) Modul Manajemen Risiko, Dr. Elly Fariani, Ak., MSc., Pelatihan Kepemimpinan Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2020.